

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Otonomi daerah diberlakukan sejak dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan pasal 120 UU No. 32 Tahun 2004 mengenai dasar hukum pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), SKPD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi permintaan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan.

Pemilihan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung sebagai objek penelitian dikarenakan Kota Bandung merupakan Ibu Kota dari Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Serta laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang tergolong tinggi, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat (*jabar.bps.go.id*).

Kota Bandung juga telah menerapkan konsep *Smart City* yang memberikan banyak memberikan manfaat bagi perkotaan dan warganya baik itu dalam hal pembangunan hingga kinerja pemerintahan dalam rangka melakukan pelayanan terhadap publik (*medium.com*). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Ahyani Raksanagara mengemukakan yaitu dengan

dimilikinya 394 aplikasi *Smart City* Kota Bandung yang bertujuan untuk memudahkan fungsi SKPD sekaligus mempermudah pelayanan terhadap publik. Dari sekian banyak aplikasi yang dibangun oleh Pemkot Bandung, sebagian aplikasi direplikasi oleh puluhan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Salah satu aplikasi yang direplikasi adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Silakip) yang digunakan oleh Pemkot Tangerang dan Pemkot Payakumbuh (*pikiran-rakyat.com*). Dengan adanya replikasi Silakip yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota lain menandakan bahwa penerapan teknologi yang dilakukan Pemkot Bandung dapat dinilai cukup baik.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Organisasi pemerintahan di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi pemerintahan tersebut, baik pusat maupun daerah diwajibkan untuk memberikan informasi yang dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut kepada publik. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban suatu entitas tersebut. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, tidak menyesatkan, dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Ihsanti, 2014).

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai Penyajian Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, informasi laporan keuangan pemerintahan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 yakni : (i) relevan yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi

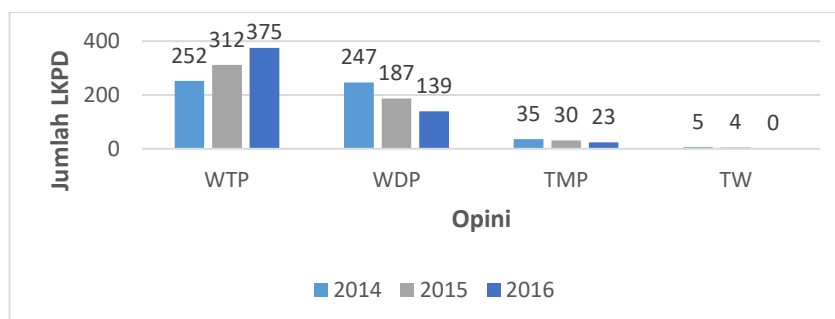
peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, (ii) andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi, (iii) dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya, dan (iv) dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Sebagai bentuk pelaksanaan PP No. 71 Tahun 2010 mengenai perubahan SAP dari basis kas menjadi basis akrual, maka pada tahun 2015 seluruh pemerintah daerah diwajibkan untuk menerapkan sistem akuntansi akrual. Perubahan peraturan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sebuah laporan keuangan dan dapat memberikan gambaran yang lengkap atas posisi keuangan pemerintah, serta dapat menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah. Menurut Syarifudin (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ini diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik serta penyajian laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Rahmadani (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang berkompeten serta memiliki latar pendidikan akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi akan membantu dan mempermudah dalam menyusun laporan keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara optimal dan terus menerus. Dengan indikator tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan suatu entitas sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran disebut sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang

selanjutnya akan dihasilkan sebuah opini setiap tahunnya sebagai salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas sebuah laporan keuangan, sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Terdapat 4 (empat) opini dari hasil pemeriksaan yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan dan diungkapkan secara wajar, tidak terdapat salah saji material, dan telah sesuai standar.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2017 terdapat 5 dari 542 pemda yang terlambat menyerahkan LKPD. Hasil pemeriksaan atas 537 LKPD pada tahun 2016 hanya 375 LKPD yang mendapat opini WTP, sedangkan 139 LKPD lainnya mendapatkan opini WDP, 23 TMP, dan 0 TW. Hasil opini tersebut telah mengalami peningkatan menuju yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut disajikan perkembangan opini LKPD dari tahun 2014 hingga 2016 :



(Sumber : *bpk.go.id*)

Gambar 1.1
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2014 – 2016, Pada Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia

Secara umum, opini dari tahun 2014-2016 menunjukkan perubahan yang lebih baik dari tahun ke tahun, dimana opini WTP mengalami peningkatan dan opini lainnya mengalami penurunan. Atas 162 LKPD di tahun 2016 yang belum memperoleh opini WTP umumnya dikarenakan terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP pada beberapa akun seperti : Aset

Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Investasi, Kewajiban, dan Belanja, yang mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2016. Serta terdapat kelemahan sistem pengendalian internal, dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan berdasarkan temuan oleh BPK sehingga menyebabkan beberapa LKPD tersebut belum meraih opini WTP.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dikeluarkan oleh pemda selama tahun anggaran 2016 pada wilayah Jawa Barat khususnya Kota Bandung, menunjukkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD di Kota Bandung hanya memperoleh opini WDP. Hal tersebut dikarenakan terdapat penyajian nilai persediaan yang tidak sesuai, saldo utang jangka pendek yang tidak diperinci dan adanya kelebihan pembayaran pada sejumlah dinas-dinas mencapai Rp12,43 miliar (*bpk.go.id*). Dari tahun 2014 – 2016 BPK belum pernah memberikan opini WTP selama 3 (tiga) tahun terakhir atas LKPD Pemerintah Kota Bandung, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Daftar Opini Laporan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2016

No.	Provinsi Jawa Barat		28		28		28	
	LKPD		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	Entitas Pemerintah Daerah							
1	Provinsi Jawa Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
2	Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
3	Kab. Bandung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
4	Kab. Bekasi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
5	Kab. Bogor	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
6	Kab. Ciamis	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
7	Kab. Cianjur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
8	Kab. Cirebon	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
9	Kab. Garut	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
10	Kab. Indramayu	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
11	Kab. Karawang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
12	Kab. Kuningan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
13	Kab. Majalengka	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
14	Kab. Pangandaran	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
15	Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
16	Kab. Subang	1	TMP	1	TMP	1	WDP	
17	Kab. Sumedang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
18	Kab. Sukabumi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
19	Kab. Tasikmalaya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
20	Kota Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	

(Bersambung)

(Sambungan)

21	Kota Banjar	1	WTP	1	WTP	1	WTP
22	Kota Bekasi	1	WDP	1	WTP	1	WTP
23	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WTP
24	Kota Cimahi	1	WTP	1	WTP	1	WTP
25	Kota Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WTP
26	Kota Depok	1	WTP	1	WTP	1	WTP
27	Kota Sukabumi	1	WTP	1	WTP	1	WTP
28	Kota Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WTP

(Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK Semester II 2017)

Meskipun Kota Bandung telah memperoleh penghargaan Akuntabilitas Kinerja Terbaik Nasional Tahun 2015 dengan predikat A (memuaskan), mengungguli kota dan kabupaten lainnya (ppid.bandung.go.id), namun pada hasil pemeriksaan BPK, LKPD Kota Bandung masih mendapatkan opini WDP sejak tahun 2014. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah pendataan aset pemerintah yang belum tuntas. Pada pemeriksaan tahun lalu, BPK menetapkan ada sejumlah aset senilai Rp11 triliun yang harus di data ulang, namun Pemkot baru menyelesaikan sekitar 85% (pikiran-rakyat.com).

Berdasarkan temuan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka akan menggambarkan bagaimana kinerja keseluruhan dan tentunya akan mempengaruhi kualitas dari sebuah laporan keuangan dari sebuah entitas. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam kewajibannya untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pihak pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, menjelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan yang memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan. Menurut Ihsanti (2014) kompetensi SDM adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. SDM merupakan faktor penting

demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Kadek Desiana Wati, dkk (2014) dalam penelitiannya menyatakan adanya kompetensi SDM mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya serta memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar Cornell Syarif Prawiradiningrat, beliau berpendapat bahwa secara umum, untuk daerah-daerah yang memiliki opini WDP kelemahannya masih menyangkut aset dan pertanggungjawaban keuangan, namun sebenarnya hal tersebut dapat diperbaiki apabila komitmen dari Kepala Daerah serta ditunjang oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kuat (*bandungekspres.co.id*). Penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitiannya mengungkapkan, semakin baik kualitas sumber daya manusia maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, menurut penelitian Syarifudin (2014) menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD karena menurut hasil penelitian tersebut tingkat kompetensi SDM bukan satu-satunya faktor yang terpenting, tetapi ada faktor lain yang ikut menentukan kualitas LKPD seperti sistem pengendalian internnya, sebab masih terdapat kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan manajemen yang kurang hati-hati.

Faktor lain yang mendukung kualitas laporan keuangan yaitu pemanfaatan teknologi informasi sebuah entitas. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi tersebut oleh pemerintah daerah juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dimana dibutuhkan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk mengelola informasi sehingga dapat dihasilkan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunan laporan keuangan yang telah terkomputerisasi dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan konsisten dibanding dengan sistem manual karena dapat membantu mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan yang disebabkan oleh *human eror* serta dapat membantu menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Dengan semakin berkembangnya teknologi

informasi, maka banyak organisasi/entitas yang telah menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer untuk mendukung kelancaran kegiatan operasi organisasi tersebut. Namun, berdasarkan Renstra Tahun 2014 - 2018 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung menjelaskan terdapat faktor penghambat dan pendorong salah satunya yaitu pengembangan teknologi informasi. Walikota Bandung dalam rapat koordinasinya, juga menyatakan bahwa para pejabat dari tingkat kewilayahan sampai ke SKPD dianggap belum semuanya menguasai teknologi dalam rangka memaksimalkan penyebaran informasi yang berkaitan dengan pemerintahan melalui beragam media (*ppid.bandung.go.id*). Dapat dikatakan bahwa pemahaman dalam penggunaan teknologi informasi dapat berguna untuk memperlancar penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah Kota Bandung. Penelitian Karmila, dkk (2014) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pemanfaatan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, menurut penelitian Surastiani (2015) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut karena sistem yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang diinginkan dan sistem masih mengalami kendala dan tampak masih asing bagi penggunanya.

Selain pemanfaatan teknologi informasi, hal penting lainnya terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah mengenai sistem pengendalian internal pemerintah. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memiliki beberapa unsur yang dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah yang terdiri dari unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Dengan demikian, SPIP dapat digunakan untuk melindungi sebuah entitas dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan akibat ketidakmampuan SDM, kesalahan akibat gangguan sistem komputer, kecurangan yang dilakukan oleh pihak

eksternal maupun internal perusahaan, serta tindakan merugikan lainnya. Berkaitan dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2017 pada Kota Bandung, masih ditemukan beberapa masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dan kelemahan sistem pengendalian internal seperti kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan serta masalah dalam pencatatan aset akibat akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP. Berdasarkan penelitian Syarifudin (2014) sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD karena menurut penelitiannya dengan adanya pengendalian intern yang efektif akan dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta dapat membantu manajemen pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut penelitian Inapty (2016), sistem pengendalian intern tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena berdasarkan penelitiannya sistem pengendalian internal pada pemerintah dianggap masih kurang efektif.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan pada latar belakang penelitian ini maka menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian melalui skripsi yang berjudul. **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung”**.

1.3 Perumusan Masalah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan, dan pengelolaan keuangan suatu unit daerah. Terkait dengan adanya perubahan regulasi penggunaan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010, maka secara tidak langsung baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2015. Maka LKPD yang diterbitkan harus memenuhi syarat normatif sebagaimana disebutkan dalam PP No. 71 Tahun 2010,

yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami agar LKPD tersebut dapat berkualitas serta dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi.

Kota Bandung memperoleh penghargaan atas Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian yang Bermutu, Akuntabel, Inovatif, dan Kreatif di tingkat Jawa Barat pada tahun 2015, namun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPD Kota Bandung masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan sejak tahun 2014, BPK juga mencatat adanya temuan-temuan yang harus diperbaiki untuk dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas harus didukung oleh beberapa faktor seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi yang digunakan dan juga sistem pengendalian internalnya.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung, maka penulis dapat mengidentifikasi pertanyaan penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian *intern*, dan kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung pada tahun 2018.
2. Bagaimana pengaruh secara simultan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian *intern* terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung pada tahun 2018.
3. Bagaimana pengaruh secara parsial kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung pada tahun 2018.
4. Bagaimana pengaruh secara parsial pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung pada tahun 2018.

5. Bagaimana pengaruh secara parsial sistem pengendalian *intern* terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung pada tahun 2018.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka dapat diidentifikasi bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, sistem pengendalian *intern*, dan kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung pada tahun 2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian *intern* terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung pada tahun 2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung pada tahun 2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung pada tahun 2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial sistem pengendalian *intern* terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung pada tahun 2018.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca maupun peneliti selanjutnya, baik secara aspek teoritis maupun praktis. Untuk itu manfaat dari penelitian ini mencakup beberapa hal :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi pendukung dalam penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung mengenai kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang akan diteliti dan menjadi variabel independen atau variabel X adalah kompetensi sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), dan penerapan sistem pengendalian *intern* (X3). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini atau variabel Y adalah kualitas laporan keuangan daerah.

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kota Bandung, yang memiliki 46 (empat puluh enam) SKPD sejak bulan Oktober 2018 hingga Desember 2018.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pada sistematika penulisan, penulis akan menjelaskan secara ringkas mengenai bab demi bab, yang terdiri dari lima bab untuk membantu penulis mempermudah pembahasan dan mengarahkan pemikiran penulis pada kerangka acuan yang telah ditentukan dengan sistematis. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan

penelitian, dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang dijadikan dasar penelitian, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan peneliti, serta kerangka teoritis yang membahas pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian-penelitian sebelumnya serta dikaitkan dengan kerangka pemikiran teoritis, maka diajukan hipotesis penelitian yang akan diuji pada hasil dan pembahasan. Bab ini diakhiri dengan penjelasan ruang lingkup penelitian yang menjelaskan secara rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian meliputi uraian tentang jenis penelitian, operasionalisasi variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data yang diperlukan, uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah analisis data dan hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan alat analisis yang diperlukan serta pembahasan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan peneliti yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga disertakan saran yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

Halaman ini sengaja dikosongkan